

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, maka penelitian ini menyimpulkan bahwa :

1. Forum yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008

Tentang Perbankan Syariah berbentuk forum penyelesaian secara non-litigasi dan secara litigasi. Bentuk forum penyelesaian secara non-litigasi seperti musyawarah, mediasi perbankan dan Melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) atau lembaga arbitrase lain. Bentuk forum penyelesaian secara litigasi yaitu penyelesaian melalui Pengadilan Agama atau penyelesaian melalui Pengadilan Negeri. Pilihan forum tersebut tidak sesuai dengan garis ketentuan Mahkamah Konstitusi dalam putusan Nomor 93/PUU-X/2012 yang menyatakan penjelasan Pasal 55 ayat (2) bertentangan dengan UUD 1945. Hambatan yang dihadapi dalam menentukan forum penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam praktek perbankan syariah yang beroperasi di Bukittinggi dan Agam antara lain berbentuk pemahaman dan pengetahuan hukum para pihak yang minim terhadap hukum perbankan syariah dan perkembangannya. Baik pihak nasabah maupun beberapa bank syariah masih menafsirkan Pasal 55 ayat 2 UU Perbankan Syariah tersebut masih bisa dijadikan pedoman dalam pilihan forum penyelesaian sengketa



2. Terdapat beberapa akad-akad yang telah dibuat pihak bank syariah dengan nasabah pasca dikeluarkannya putusan MK No. 93/PUU-X/2012, yang tetap membuat pernyataan atau klasula penyelesaian sengketa di forum selain peradilan agama. Tidak adanya perubahan (*addendum*) terhadap isi akad, sehingga pihak bank syariah terkait harus memperhatikan ketentuan berdasarkan Putusan Mahkamah Konsitusi No. 93/PUU-X/2012. Hal itu berdampak pada kesepakatan atau akad tersebut bisa saja mengandung unsur melawan hukum karena bertentangan dengan norma Pasal 1320 ayat (4) KUH Perdata mengenai sebab yang halal.

3. Beberapa perbankan syariah sampai saat ini masih mempergunakan frasa pilihan forum penyelesaian sengketa mengacu pada Pasal 55 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 yang tetap mencantumkan Pengadilan Negeri sebagai forum penyelesaian sengketa disebabkan faktor kurangnya sosialisasi terhadap perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketiadaan personalia pada bidang hukum/staf legal pada beberapa bank syariah. Hal tersebut berdampak pada akad atau perjanjian yang dibuat terkadang bertentangan dengan undang-undang, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang bersepakat membuat akad.

B. Saran

Saran dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan kepada pihak Bank Syariah yang belum merubah ketentuan dalam akadnya mengenai forum penyelesaian perselisihan, agar mengubah

forum penyelesaian sengketa perbankan syariah pada jalur litigasi ke Pengadilan Agama.

2. Disarankan kepada pemerintah dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk melakukan pengawasan khususnya dalam hal pembuatan akad perjanjian dengan nasabah, agar klausula-klausula yang terdapat di dalam akad-akad yang dibuat tidak bertentangan dengan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

3. Disarankan agar Notaris memberikan masukan kepada pihak Bank Syariah terkait dengan pembuatan akad yang akan dilakukan di hadapan Notaris tersebut. Berkaitan juga dengan konsekuensi-konsekuensi hukum yang timbul dari akta yang ditanda tangani oleh para pihak dihadapan Notaris tersebut.

